

BAB II

DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan hal – hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang pertama menjelaskan letak geografis Kota Batam, wilayah administrasi, serta visi dan misi dari Kota Batam. Kedua membahas tentang Sejarah LPSE Kota Batam, tupoksi dan struktur organisasi dari LPSE Kota Batam.

2.1 Deskripsi Umum Kota Batam

Kota Batam merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi pertumbuhan yang sangat pesat dibanding dengan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan letak yang sangat strategis berada di dekat Singapura yang menjadikan Kota Batam sebagai salah satu tempat utama perdagangan dan bisnis.

2.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kota Batam terletak di tempat yang sangat strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional. Wilayah Kota Batam terletak antara $0^{\circ} 25' 29''$ “ $-1^{\circ} 15' 00''$ ” Lintang Utara $103^{\circ} 34'35''$ - $104^{\circ} 26' 04''$ Bujur Timur. Kota Batam yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.

2.1.2 Visi dan Misi Kota Batam

2.1.2.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka disusunlah Visi Kota Batam Tahun 2016-2021. Adapun Visi yang tersebut adalah :

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Berikut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Batam yang meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh warga-nya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batastertentu yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.
2. Bandar Dunia yang mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional AsiaTenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi “*center of excellences*”, dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.
3. Madani yang mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan

beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.

4. Berdaya Saing yang mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.
5. Maju adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
6. Sejahtera yang bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.
7. Bermartabat yang mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki

aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status.

2.1.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak membedakan status dari warga-nya. Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya.
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya publik dan daya dukung lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.
4. Mewujudkan penguatan sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan pertanian/ perikanan dalam menopang perekonomian daerah. Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta peningkatan

kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan value added terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut.

5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan publik dan pasar. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor UMKM dan Koperasi dengan kegiatan publik di Kota Batam, sehingga UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis komoditas yang akan dijual, permodalan, dan kepastian dalam hal sustainability businesses. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di wilayah hinterland, sehingga masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi

dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di wilayah hinterland menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah hinterland.

2.2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam

2.2.1 Profil

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan sebuah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. LPSE sebuah unit kerja yang dibentuk diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan.

2.2.2 Tupoksi UPTD LPSE Kota Batam

2.2.2.1 Tugas Pokok

- a. UPTD LPSE mempunyai tugas pokok memfasilitasi penyelenggaraan layanan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik di Kota Batam.
- b. Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan

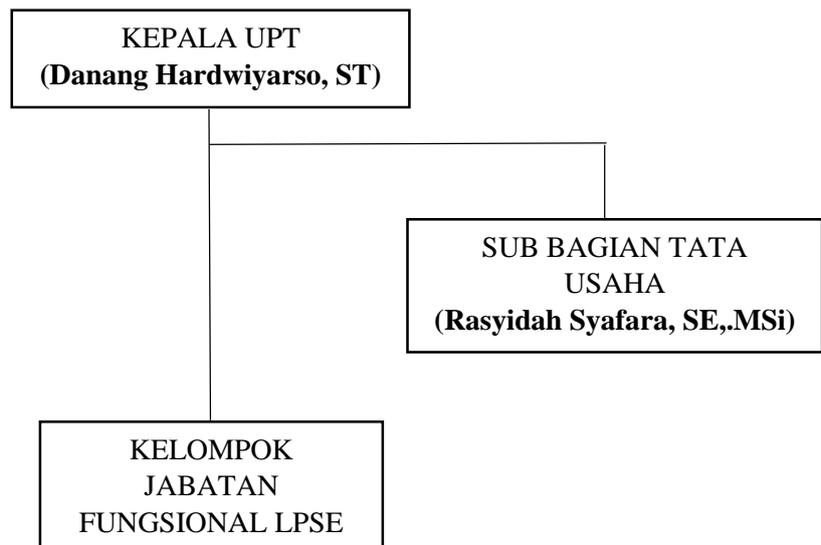
serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

2.2.2.2 Fungsi

- a. UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya yang membidangi penyelenggaraan *e-government*.
- b. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan LPSE.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan LPSE.

2.2.3 Struktur Organisasi

Bagan 2.1
Struktur Organisasi LPSE Kota Batam



Sumber: LPSE Kota Batam 2019.

2.2.4 Sistem *E-Procurement* di Kota Batam

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan lembaga yang bertugas untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan tentang pengadaan.

E-procurement merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang baik adalah dengan cara perubahan atau reformasi dalam tata pemerintahan dengan

menerapkan kegiatan yang didukung oleh teknologi informasi (*e-government*).

Pada proses pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Batam sebelum adanya sistem *e-procurement*, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara manual. Dimana pihak penyedia bisa bertemu atau bertatap muka langsung dengan pihak pengguna jasa. Dalam lelang secara manual ini terdapat kebocoran informasi mengenai lelang yang akan dilakukan oleh pemerintah, sebelum paket lelang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Tulus Wikyanto selaku Direktur PT. Tunesa Mulya Mandiri yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2019 mengatakan bahwa :

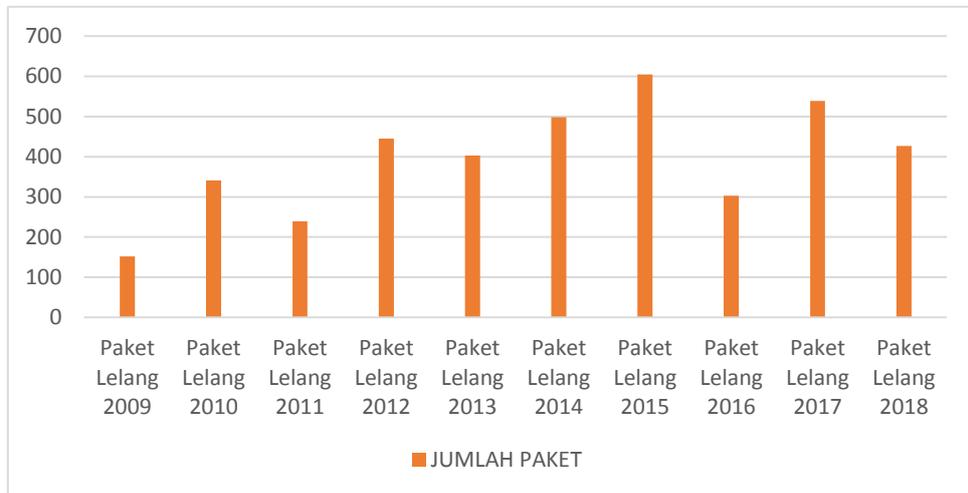
“Sebelum adanya sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa banyak terjadi kecurangan salah satunya yaitu kebocoran informasi lelang sebelum paket lelang ditetapkan oleh pemerintah.”

Dengan pemaparan salah satu penyedia jasa yang mengeluhkan bahwa dalam pengadaan secara manual dapat merugikan beberapa penyedia jasa yang tidak memiliki akses langsung dengan pengguna jasa, dimana mereka tidak memiliki kesempatan yang besar untuk memenangkan lelang tersebut. Sedangkan pihak penyedia jasa yang memiliki akses langsung dengan pihak pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi yang jauh lebih akurat untuk memenangkan lelang tersebut.

Oleh karena itu pemerintah melakukan perubahan sistem dalam pengadaan lelang barang dan jasa dari manual menjadi sistem elektronik yang dimana dalam sistem elektronik tersebut mudah dipantau oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Maka setelah adanya sistem *e-procurement* ini pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan sangat efektif, efisien, dan transparan. Dengan diterapkannya sistem *e-procurement* tersebut maka pihak penyedia sudah tidak merasa dibedakan lagi, karena semua prosedur dalam menjalankan tugas dapat diakses oleh penyedia jasa yang sudah mendaftarkan PT/CV mereka.

Semanjak didirikannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam pada tahun 2009 sudah melakukan lelang secara elektronik dalam bentuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya, dapat dilihat pada grafik dibawah terdapat jumlah paket lelang yang telah dilakukan LPSE Kota Batam sejak tahun 2009-2018 sebagai berikut:

Grafik 2.1
Jumlah Paket Lelang LPSE Kota Batam Pada Tahun 2009 – 2018



Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kota Batam, <https://lpse.batam.go.id/eproc4/lelang> dan pada tanggal 18/2/2019.

Berdasarkan grafik 2.1 di atas sejak berdirinya LPSE Kota Batam pada tahun 2009 hingga 2018 terdiri dari pengadaan barang, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya sebanyak 3.952 paket lelang yang telah dilakukan melalui *e-procurement*. Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah paket lelang setiap tahunnya beragam jumlahnya. Dengan anggaran pada 3 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.1

Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa LPSE Kota Batam

| No | Tahun | Jumlah Anggaran Yang Tersedia (Rp.) |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|
| 1. | 2016 | 2.330.258.250.784,45 |
| 2. | 2017 | 2.495.947.553.697,29 |
| 3. | 2018 | 2.572.288.383.286,26 |

Sumber : LPSE Kota Batam, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah anggaran pada pengadaan barang dan jasa Kota Batam dapat dilihat meningkat setiap tahunnya. Anggaran yang tersebut berguna untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Anggaran tersebut berasal dari APBN.